

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Victoria Ari Palma Akadiati ¹⁾*

¹⁾³⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
Jalan Purnawirawan 1 Rajabasa Lampung, Indonesia

¹⁾ vicaripalma23@gmail.com

Article history:

Received 15 December 2019;
Revised 25 January 2019;
Accepted 5 February 2019;
Available online 21 February 2020

Keywords: {use 4-6 keywords}

dewan komisaris
komite audit
ketepatan waktu pelaporan
kode notasi khusus

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019. Metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dianalisis menggunakan regresi liner berganda dengan sampel perusahaan yang memiliki kode notasi khusus yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan. Kontribusi penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan para investor dalam pemilihan dan kepemilikan saham serta dapat dijadikan sarana perlindungan kepada para investor yang akan menanamkan saham pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan apakah perusahaan masuk ke dalam kode notasi khusus. Penelitian berikutnya dapat dilakukan pengujian terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang memperoleh kode notasi khusus.

I. INTRODUCTION

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik (BAPEPAM, 2011). Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal perusahaan maupun bagi pihak external perusahaan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang tercatat pada pasar bursa atau pada Bursa Efek Indonesia belum menyampaikan laporan keuangan.

Pada akhir tahun 2019 berdasarkan data dari laman Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>) terdapat 9 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan yaitu: 1) PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, 2) PT Cakra Mineral Tbk, 3) PT Evergreen Invesco Tbk, 4) PT Sugih Energy Tbk, 5) PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk, 6) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, 7) PT Nipress Tbk, 8) PT Golden Plantation Tbk, 9) PT Arthavest Tbk, yang diberikan Notasi Khusus dengan kode L. Kode notasi khusus berdasarkan SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 (Tercatat et al., 2018) merupakan huruf yang dituliskan dibelakang kode perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan adanya 7 kondisi perusahaan. Kode notasi khusus dan kondisi perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: B = adanya permohonan pernyataan pailit, M = adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), S = laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha, E = laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, A = adanya Opini Tidak Wajar

* Corresponding author

(Adverse) dari akuntan publik, D = adanya Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari akuntan publik, L = perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan.

Beberapa penelitian terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan mengalami perbedaan hasil. Penelitian (Kustanti, 2016) menjelaskan bahwa kompetensi komite audit, ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berhubungan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian (Elviani, 2017) yang dilakukan terhadap laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan tahun pengamatan tahun 2011 hingga 2015 diperoleh hasil bahwa Debt to Equity Ratio dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Profitabilitas dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Ardanty & Sofie, 2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2014 diperoleh kesimpulan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Asumsi dari *Signaling Theory* adalah para manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak luar (investor). Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi antara pihak – pihak yang berkepentingan (Jogiyanto, 2014). Informasi yang disampaikan kepada publik akan memberikan sinyal bagi investor dalam keputusan melakukan investasi dimana para pelaku pasar (investor) terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai pertanda atau sinyal baik atau sinyal buruk. Sinyal yang dapat dibaca oleh para investor dalam penelitian ini adalah adanya pemberian kode notasi khusus pada emiten atau perusahaan public yang terdaftar di pasar bursa.

Ketepatan Waktu Pelaporan

Perusahaan yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangannya secara terbuka kepada umum. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 (Modal, 1996) disebutkan bahwa setiap perusahaan public atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atas fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Laporan keuangan lengkap berdasarkan (Keputusan Ketua Bapepam dan LK, 2011) yang diserahkan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) paling sedikit 2 (dua) eksemplar dalam bentuk asli dan salinan elektronik (*soft copy*) terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca);
2. Laporan laba rugi komprehensif;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika emiten atau perusahaan public menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya;
6. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Notasi Khusus

Notasi khusus merupakan kode yang diberikan Bursa Efek Indonesia pada emiten atau perusahaan tercatat yang bermasalah. Letak kode notasi khusus ditambahkan pada bagian belakang kode emiten. Pemberian kode notasi khusus ini disebut dengan *I-Suite* yang baru diterapkan sejak tanggal 27 Desember 2018, dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan kepada para investor yang akan menanamkan saham pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tujuan lainnya adalah bagi emiten yang mendapatkan kode notasi khusus dapat segera memperbaiki dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kode notasi khusus berdasarkan SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 (Tercatat et al., 2018) adalah sebagai berikut:

B = adanya permohonan pernyataan pailit,

M = adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
S = laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha,
E = laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif,
A = adanya Opini Tidak Wajar (*Adverse*) dari akuntan publik,
D = adanya Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) dari Akuntan Publik,
L = perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan.

Sebagai contoh pada tanggal 27 Desember 2018 Bursa Efek Indonesia memberikan dua kode notasi khusus pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu AISA.ML yang berarti emiten dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan belum menyampaikan laporan keuangan (<https://www.idx.co.id/>).

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan public yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi yang berjumlah paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan public maupun usaha dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris.

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan public dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Apabila jumlah dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota maka komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Pada pasal 21 peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dijelaskan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan public dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen periode berikutnya; b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public tersebut; c) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan public, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama; d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan public tersebut.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari seberapa besar presentase kepemilikan saham yang dimiliki direksi, manajer, serta dewan komisaris yang tertera pada laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial pada perusahaan mendorong adanya pengawasan serta peningkatan terhadap kinerja manajemen dan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (Ekonomi et al., 2017)

Kepemilikan Institusional

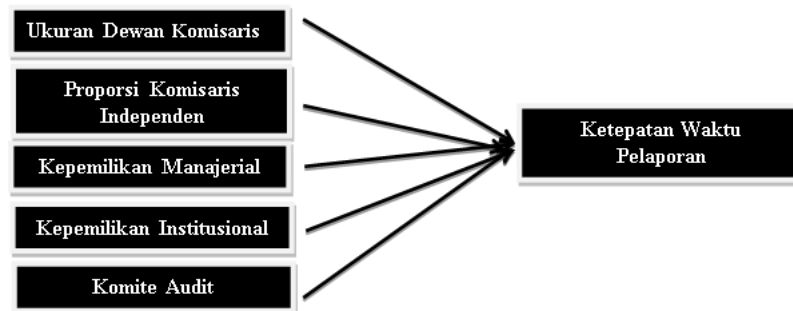
Menurut (Suparlan, S.E, 2019) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain yang memiliki kemampuan mengendalikan pihak manajemen dalam proses monitoring secara efektif. Kepemilikan institusional menurut (Widianingsih, 2018) semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan akan semakin meningkat.

Komite Audit

Komite Audit berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan public. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah disajikan maka dibuatlah sebuah kerangka teori pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.



Gambar 1. Kerangka Teori

Hipotesis

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Ukuran Dewan Komisaris menurut (Thesarani, 2013) adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian (Mapadang, 2020) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi yang terdapat dalam organisasi perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Ha₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Menurut (Welly Salipadang et al., 2017) komisaris merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris Independen memainkan peran yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan (Savitri, 2010).

Ha₂: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Dalam sebuah perusahaan, kepemilikan manajerial sangat penting karena terkait dengan menentukan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pengendalian operasional yang diterapkan pada masing-masing perusahaan. Kepemilikan manajerial pada perusahaan mendorong adanya pengawasan serta peningkatan terhadap kinerja manajemen dan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (Ekonomi et al., 2017)

Ha₃: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Penelitian Verawati (Terhadap et al., 2014) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pada perusahaan sector keuangan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2014. Kepemilikan institusional (Welly Salipadang et al., 2017) merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham.

Ha₄: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Komite Audit berdasarkan penelitian (Ekonomi et al., 2017) memiliki pengaruh dalam ketepatan penyampaian laporan keuangan. Komite audit dalam Sarbanes Oxley Ast terdiri dari Board of Director yang bertujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit menjalankan fungsinya antara lain menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan emiten atau perusahaan public kepada pihak lain diantaranya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait keuangan.

Ha₅: Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan kode notasi khusus tahun 2019.

III. METHODS

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kuantitatif. Sugiyono, 2017 mengartikan Penelitian Deskriptif Kuantitatif adalah sebagai berikut : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan kode notasi khusus pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.

Tempat dan Waktu Penelitian

Proses penelitian dilakukan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan selesai. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang mendapatkan kode Notasi Khusus dari Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2019. Data keuangan perusahaan yang diolah diperoleh dari laman (<https://www.idx.co.id/>) dan pada website masing-masing perusahaan selama periode 2017, 2018 dan 2019.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017). Sample dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode Notasi Khusus yaitu 38 perusahaan tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sample Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Notasi	Keterangan Notasi
1	POLY.E	Asia Pacific Fibers Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
2	SIMA.E	Siwani Makmur Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
3	BORN.ELS	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	E,L,S	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negative L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan S: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
4	CKRA.DLS	Cakra Mineral Tbk.	D,L,S	D: Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan S : Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
5	ARGO.E	Argo Pantas Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
6	GREN.L	Evergreen Invesco Tbk	L	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
7	TRIO.ED	Trikonsel Oke Tbk	E,D	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negative D: Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik
8	MTFN.E	Capitalinc Investment Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
9	OCAPE	ONIX CAPITAL Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir

				menunjukkan ekuitas negatif
10	AIMS.S	Akbar Indomakmur Stimec Tbk	S	S: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
11	TAXI.E	Express Transindo Utama Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
12	INDX.D	Tanah Laut Tbk	D	D: Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik
13	SQMI.ES	Wilton Makmur Indonesia Tbk	E,S	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negative S: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
14	APOL.BE	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	B,E	B: Adanya permohonan Pernyataan Pailit E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
15	ZBRA.E	Zebra Nusantara Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
16	SUGI.L	Sugih Energy Tbk	L	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
17	MDRN.E	Modern Internasional Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
18	GLOB.E	Global Teleshop Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
19	UNSP.E	Bakrie Sumatera Plantations Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
20	CANI.EL	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.	E,L	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negative L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
21	CNTX.E	Centex Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
22	AISA.L	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	L	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
23	FINN.M	PT First Indo American Leasing Tbk.	M	M: Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
24	KARW.E	ICTSI JASA PRIMA Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
25	DWGL.E	PT Dwi Guna Laksana Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
26	CNKO.E	Exploitasi Energi Indonesia Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
27	ETWA.E	Eterindo Wahanatama Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
28	NIPS.L	Nipress Tbk	L	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
29	BTEL.ED	Bakrie Telecom Tbk	E,D	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negative D: Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik
30	GOLL.ML	PT Golden Plantation Tbk	M,L	M: Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

31	BIMA.E	Primarindo Asia Infrastructure Tbk	E	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
32	MITI.DS	Mitra Investindo Tbk	D,S	D : Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik S: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
33	SAFE.E	Steady Safe Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
34	ARTA.L	Arthavest Tbk	L	L: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
35	MGNA.E	PT Magna Investama Mandiri Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
36	JKSW.E	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
37	LAPD.E	Leyand International Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
38	SULI.E	PT SLJ Global Tbk	E	E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif

Sumber dan Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan langsung berupa data kuantitatif yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data didapatkan dari sumber yang telah ada, yaitu laporan keuangan perusahaan kode notasi khusus di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2019. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer sebagai data utama yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan dengan kode notasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan data laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2019.
- Data Sekunder sebagai data tambahan yang berasal dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang terkait dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan serta menganalisa data dan literatur yang memiliki keterkaitan dalam penyusunan penelitian ini. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kuantitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Sugiyono,2017). Informasi lainnya diperoleh dari Laporan keuangan, buku, penelitian terdahulu mengenai pembahasan yang sama, situs internet terkait penelitian.

Instrumen Penelitian

Indikator variable penelitian yang digunakan pada penelitian ini disajikan dalam table di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Ketepatan Waktu Pelaporan (Y)	Perusahaan menyajikan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan BAPEPAM	Dummy
Ukuran Dewan Komisaris (X1)	Ukuran dewan komisaris menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris	Rasio
Proporsi Dewan Komisaris Independen (X2)	Proporsi keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (<i>outside directors</i>) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan. Komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh	Rasio

	anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)	
Kepemilikan Intstitusional (X3)	Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar	Rasio
Kepemilikan Manajerial (X4)	Jumlah saham manajerial dibagi jumlah saham yang beredar	Rasio
Komite Audit (X5)	Komite Audit diukur menggunakan jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan sampel	Rasio

Sumber: olah data peneliti 2020

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data peneliti memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis.

Data penelitian ini akandianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik, yang terdiri dari: Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi *time series* dan regresi *cross-sectional*. Penggunaan dua jenis regresi ini disebut sebagai *pooled regression*, yaitu regresi dengan melibatkan banyak perusahaan dan menggunakan beberapa periode.

IV. RESULTS

Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data akan diuji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* akan menunjukkan normal atau tidaknya data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, maka distribusi data penelitian dinyatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas (*sig*) > 0,05. Dari 38 perusahaan sample yang memenuhi criteria sample dengan menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2017, 2018 dan 2019 hanya 25 perusahaan sample.

Tabel 3. Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,44272714
Most Extreme Differences	Absolute	0,142
	Positive	0,127
	Negative	-0,142
Test Statistic		0,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal,
- Calculated from data,
- Lilliefors Significance Correction,
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber: olah data peneliti 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil Uji Normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Sminov* didapatkan nilai *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,200 hasil tersebut lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas data residual pada penelitian ini adalah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2011).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
1			
(Constant)			
UDK	0,424	2,360	Bebas Multikolinieritas
Proporsi DKI	0,335	2,989	Bebas Multikolinieritas
Kepemilikan Institusional	0,218	4,586	Bebas Multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial	0,246	4,073	Bebas Multikolinieritas
Komite Audit	0,902	1,108	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan

Sumber: olah data peneliti 2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada table di atas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 1,0 dan nilai *VIF* < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi permasalahan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1					
(Constant)	0,246	0,753		0,326	0,748
UDK	-0,164	0,092	-0,438	-1,794	0,089
Proporsi DKI	-2,372	0,725	-0,898	-3,270	0,004
Kepemilikan Institusional	-0,134	0,320	-0,143	-0,420	0,679
Kepemilikan Manajerial	-0,177	0,326	-0,174	-0,541	0,595
Komite Audit	0,568	0,184	0,516	3,084	0,006

a. Dependent Variable: ares_1

Sumber: olah data peneliti 2020

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial masing-masing memiliki nilai signifikansi diatas nilai alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
	B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1 (Constant)	0,455	2,256		0,202	0,843
UDK	-0,007	0,271	-0,009	-0,024	0,981
Proporsi DKI	0,117	2,215	0,022	0,053	0,959
Kepemilikan Institusional	-0,062	0,950	-0,033	-0,065	0,949
Kepemilikan Manajerial	-0,108	0,975	-0,053	-0,111	0,913
Komite Audit	-0,149	0,567	-0,068	-0,264	0,795
RES_2	0,243	0,261	0,243	0,931	0,365

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: olah data peneliti 2020

Pada table di atas menunjukkan bahwa hasil uji autokorelasi dengan menggunakan alat uji *Bruesch-Godfrey* menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dikarenakan memiliki nilai signifikansi RES_2 lebih besar dari nilai alpha 0,05 yaitu 0,365.

Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Dengan uji ini akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan dari uji ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang dipakai adalah model regresi linier berganda. Menurut sugiyono (2017) bahwa: analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda dapat dilakukan bila jumlah variabel independen minimal dua. Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

- Y =
- a = Konstanta
- b₁ dan b₂ = Koefisien variabel independen (regresi X₁ dan X₂)
- X₁ = Ukuran Dewan Komisaris
- X₂ = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X₃ = Kepemilikan Institusional
- X₄ = Kepemilikan Manajerial
- X₅ = Komite Audit
- e = error

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1			
	(Constant)	1,042	2,187
	Ukuran Dewan Komisaris (UDK)	-0,326	0,266
	Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI)	-1,175	2,107
	Kepemilikan Institusional (KI)	-1,302	0,928
	Kepemilikan Manajerial (KM)	-1,816	0,947
	Komite Audit (KA)	0,634	0,535
			0,249

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan
Sumber: olah data peneliti 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 1,042 - 0,326 - 1,175 - 1,302 - 1,816 + 0,634 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan variable Ketepatan Waktu Pelaporan = 1,042 – 0,326 UDK – 1,175 Proporsi DKI – 1,302 KI – 1,816 KM + 0,634 KA - e.

Hasil persamaan regresi linier baerganda adalah:

- Konstanta untuk penelitian ini adalah 1,042 dengan arti bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit memiliki nilai konstan (nol). Maka ketepatan waktu pelaporan akan meningkat sebesar 1,042.
- Ukuran Dewan Komisaris, nilai koefisien regresi variabel Ukuran Dewan Komisaris (X_1) sebesar -0,326 menunjukkan bahwa setiap penurunan ukuran dewan komisaris sebesar satu satuan mengakibatkan terjadi penurunan ketepatan waktu pelaporan sebesar -0,326 dengan asumsi variable independen yang lain bernilai tetap.
- Proporsi Dewan Komisaris Independen, nilai koefisien regresi variable proporsi dewan komisaris independen sebesar -1,175 menunjukkan bahwa setiap penurunan proporsi dewan komisaris independen sebesar satu satuan mengakibatkan terjadi penurunan ketepatan waktu pelaporan sebesar -1,175 dengan asumsi variable independen yang lain bernilai tetap.
- Kepemilikan Institusional, nilai koefisien regresi variable kepemilikan institusional sebesar -1,302 menunjukkan bahwa setiap penurunan kepemilikan institusional sebesar satu satuan mengakibatkan terjadi penurunan ketepatan waktu pelaporan sebesar -1,302 dengan asumsi variable independen yang lain bernilai tetap.
- Kepemilikan Manajerial, nilai koefisien regresi variable kepemilikan manajerial sebesar -1,816 menunjukkan bahwa setiap penurunan kepemilikan manajerial sebesar satu satuan mengakibatkan terjadi penurunan ketepatan waktu pelaporan sebesar -1,816 dengan asumsi variable independen yang lain bernilai tetap.
- Komite Audit, nilai koefisien regresi variable komite audit sebesar 0,634 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan komite audit sebesar satu satuan mengakibatkan terjadi kenaikan ketepatan waktu pelaporan sebesar 0,634 dengan asumsi variable independen yang lain bernilai tetap.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji statistik t (uji nilai-t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian nilai-t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan dengan membandingkan signifikansi:

- Apabila signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

b) Apabila signifikansi > 0,05 maka Ho diterima

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		t	Sig.
1	(Constant)	0,476	0,639
	UDK	-1,225	0,235
	Proporsi DKI	-0,557	0,584
	Kepemilikan Institusional	-1,402	0,177
	Kepemilikan Manajerial	-1,917	0,070
	Komite Audit	1,186	0,250

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan

Sumber: olah data peneliti 2020

Hasil uji t menunjukkan bahwa

1. variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai t hitung sebesar -1,225 dengan signifikansi ukuran dewan komisaris sebesar 0,235 > 0,05 maka H_{a1} ditolak.
2. Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai t hitung sebesar -0,557 dan nilai signifikan sebesar 0,584 > 0,05 maka H_{a2} ditolak.
3. Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai t hitung sebesar -1,402 dan nilai signifikan sebesar 0,177 > 0,05 maka H_{a3} ditolak.
4. Variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai t hitung sebesar -1,917 dan nilai signifikan sebesar 0,070 > 0,05 maka H_{a4} ditolak.
5. Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai t hitung sebesar 1,186 dan nilai signifikan sebesar 0,250 > 0,05 maka H_{a5} ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengevaluasi model regresi terbaik menggunakan nilai *Adjusted R*². Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2011), apabila dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted R*² negatif maka nilai *Adjusted R*² dianggap bernilai 0.

Tabel 9. Hasil Analisis R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,496 ^a	0,246	0,048	0,4976

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, UDK, Proporsi DKI, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan

Sumber: olah data peneliti 2020

Pada tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,246 artinya semua variabel yang diteliti yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi DKI, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit mempunyai pengaruh sebesar 24,6% terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan sedangkan 75,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. **Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Ukuran dewan komisaris (UDK) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hipotesis pertama (H_{a1}) ditolak dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung $-1,225$ dan nilai sig. sebesar $0,235 > 0,05$. Penelitian ini tidak didukung oleh hasil penelitian (Mapadang, 2020) yang menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi yang terdapat dalam organisasi perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hipotesis kedua (H_{a2}) ditolak dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung $-0,557$ dan nilai sig. sebesar $0,584 > 0,05$. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian (Savitri, 2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memainkan peran yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hipotesis ketiga (H_{a3}) ditolak dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung $-1,402$ dan nilai sig. sebesar $0,177 > 0,05$. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Verawati (Terhadap et al., 2014) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pada perusahaan sector keuangan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2014.
4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hipotesis keempat (H_{a4}) ditolak dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung $-1,917$ dan nilai sig. sebesar $0,070 > 0,05$. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian (Ekonomi et al., 2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial pada perusahaan mendorong adanya pengawasan serta peningkatan terhadap kinerja manajemen dan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Hipotesis kelima (H_{a5}) ditolak dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung $1,186$ dan nilai sig. sebesar $0,250 > 0,05$. Hasil penelitian ini tidak didukung dengan penelitian (Ekonomi et al., 2017) memiliki pengaruh dalam ketepatan penyampaian laporan keuangan.

V. CONCLUSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan yang memiliki kode notasi khusus pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan yang mendapatkan kode notasi khusus di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa teknik pengujian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

REFERENCES

- Ardanty, R. D., & Sofie. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2012, 1–25.
- BAPEPAM. (2011). Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*, 1–4.
- Ekonomi, E., Universitas, B., Ketepatwaktuan, F. Y. M., & Badera, I. D. N. (2017). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Email : sgdwiyani@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Lapora. 4*, 1451–1480.
- Elviani. (2017). Faktor-faktor berpengaruh bagi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Risert Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol 4(No 3), 1–10. file:///C:/Users/HP/Downloads/327-876-1-SM.pdf
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jogiyanto, 2014. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi ke 10)*. BPFE: Yogyakarta.
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK. (2011). Kep-346/BL/2011 : Penyampaian Laporan Tahunan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. *Kep-346/BL/2011, Juli, 1–4*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar->

- modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/emiten-dan-perusahaan-publik/Pages/pelaporan-emiten-dan-perusahaan-publik.aspx
- Kustanti, A. T. (2016). Hubungan Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(3), 1–24.
- Mapadang, A. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–11.
- Modal, B. P. P. (1996). *Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. 1–2. http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/bursa-efek/Documents/IIIA3_1388727429.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf)
- Savitri, R. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Skripsi*, 1–154.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. edited by Alfabeta. Bandung.
- Suparlan, S.E, M. S. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa. (*ALIANSI*), *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 48–65.
- Tercatat, D. P., Pailit, P., Tampilnya, M., Khusus, N., Tampilan, B., & Khusus, N. (2018). *Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl.Jend. Sudirman Kav.SB3 Jakarta 12190* -. 15, 51–53.
- Terhadap, P., Waktu, K., Keuangan, P., Verawati, N., & Verawati, N. (2014). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN STRUKTUR Nani Verawati*. 45–56.
- Thesarani, N. J. (2013). Thesarani. *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Struktur Modal*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16641>
- Welly Salipadang, Robert Jao, & Beauty. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Return Saham. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 83–101. www.neraca.co.id
- Widianingsih, D. (2018). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, serta Komite Audit pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.196>